

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, memutuskan jalan cita-citanya membangun negara kawasan Asia Timur Raya sehingga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan Kemerdekaan. Bangsa Indonesia yang sempat dijanjikan oleh Jepang untuk merdeka, semakin nyata dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Ir. Soekarno dan Mohamad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi ini merupakan babak baru bagi sejarah bangsa Indonesia setelah beberapa abad lamanya dijajah oleh bangsa lain. Sejak proklamasi kemerdekaan, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah yang menjadi Negara Republik Indonesia merupakan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Republik Indonesia belum memiliki angkatan perang. Terutama setelah PETA (Pembela Tanah Air) dilucuti dan dibubarkan, Republik yang masih muda ini sama sekali tidak memiliki pasukan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman luar maupun dalam. Pemerintah tidak segera membentuk tentara nasional atas pertimbangan tertentu. Menurut Sundhaussen (1988, hlm. 11) "...tentara pendudukan Jepang akan berkeberatan mengingat bahwa mereka secara resminya masih bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum, maka Soekarno tidak mengangkat seorang Menteri Pertahanan". Berdasarkan pernyataan itu, nampaknya Pemerintah Republik Indonesia tidak ingin memancing konflik antara tentara nasionalnya dengan tentara Jepang. Maka dari itu, sebagai gantinya pemerintah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Secara keorganisasian BPKKP mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan tugas memelihara keamanan bersama rakyat.

BKR bukan sebuah tentara yang dapat digunakan sebagai alat pertahanan negara, melainkan hanya bertugas memelihara keamanan bersama rakyat secara sukarela. BKR tidak juga memiliki komando yang terpusat, sehingga para komandannya mendirikan BKR di daerah masing-masing. Di Jawa Barat, sebagaimana disebutkan Djirdjosisworo (1994, hlm. 24) “Maka berdirilah Badan Keamanan Rakyat (BKR) setempat-setempat di pelosok-pelosok Jawa Barat dengan pusat masing-masing buat Karesidenan Banten di Serang, di Bandung buat Karesidenan Priangan, Cirebon buat Karesidenan Cirebon”. BKR ini banyak diikuti oleh para pemuda, khususnya mereka mantan prajurit PETA, KNIL (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*) dan *Heiho*. Pada perkembangan berikutnya BKR ini menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tentara reguler Republik Indonesia.

Hingga petengahan tahun 1946 pasukan tempur Tentara Republik Indonesia terdapat sepuluh Divisi, tujuh diantaranya di Jawa dan tiga Divisi di Sumatera. Di Jawa Barat khususnya terbentuk satu Divisi yang menggunakan nama bersejarah dari daerahnya dengan nama Siliwangi. Divisi Siliwangi merupakan gabungan dari tiga Divisi sebelumnya yakni Divisi I/Banten, Divisi II/Cirebon dan Divisi III/Purwakarta. Divisi Siliwangi memiliki tanggung jawab pertahanan di wilayah Jawa Barat. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, kesatuan-kesatuan dalam Divisi Siliwangi berjuang secara gerilya di Jawa Barat melawan tentara Belanda yang bermaksud mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Meskipun bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat, Divisi Siliwangi sebagai bagian dari TNI juga bertanggung jawab atas keamanan seluruh wilayah negara Republik Indonesia

Di tengah kesibukkan perang gerilya, pasukan Siliwangi mendengar kabar bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan Renville. Sebagaimana disebutkan Kahin (2013, hlm. 326) “...pada 17 Januari 1948, pemerintah Republik bersama Belanda menandatangani Perjanjian Renville meliputi gencatan senjata secara militer”. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut adalah tentara Republik yang berada di Jawa Barat harus dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia sesuai persetujuan Renville. Ketentuan ini memaksa Divisi Siliwangi yang masih bergerilya di wilayah Jawa Barat agar segera memindahkan segenap

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekuatannya ke daerah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan Yogyakarta sekitarnya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan *hijrah* Siliwangi. Beberapa orang sering kali menyamakan istilah *hijrah* Siliwangi dengan *long March* Siliwangi, atau terkadang menggunakan kedua istilah tersebut dengan tertukar. Secara hakikat keduanya memang memiliki makna yang sama yakni pindah. Namun, secara pelaksanaan kedua istilah tersebut dapat dibedakan.

Pasukan Siliwangi dengan patuh melaksanakan tugasnya untuk *hijrah* ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun ada keraguan dalam menaati perintah, dengan alasan prajurit Siliwangi telah berhasil mengembangkan benteng-benteng pertahanan gerilya. Selain itu, Divisi Siliwangi juga harus melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) yang merupakan kebijakan dari Perdana Menteri Hatta (Soetanto, 2007b, hlm. 60). Divisi Siliwangi harus melakukan reorganisasi Divisinya pada saat berada di daerah *hijrah*. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan dari prajurit Siliwangi yang terseleksi dan harus dinonaktifkan dari tugasnya. Di antara mereka banyak yang lebih memilih untuk kembali ke Jawa Barat. Namun, Divisi Siliwangi kembali tidak mengambil sikap menentang kebijakan dari pemerintah, melainkan patuh terhadap tugas yang diberikan.

Sementara itu, di saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan eksistensi Republik Indonesia, pada tanggal 18 September 1948 meletus pemberontakan PKI Madiun. Tokoh dibalik pemberontakan itu adalah Muso dan Amir Syarifuddin yang sebelumnya membangun oposisi terhadap pemerintah. Menurut Djamhari (1971, hlm. 33) “Pihak pemberontak berhasil menguasai Madiun yang dianggap sebagai daerah yang dibebaskan. Dengan menggunakan radio Gelora Pemuda, pimpinan pemberontak melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat”. Saat itu Indonesia mengalami situasi yang semakin sulit, di samping berjuang melawan kekuatan Belanda juga harus melawan saudaranya sendiri yang berkhianat terhadap Republik Indonesia. Divisi Siliwangi yang ketika itu berada di wilayah *hijrah* ikut terlibat dalam menumpas pemberontakan tersebut. Namun dalam penulisan sejarah nasional, kesatuan-kesatuan tingkat batalyon Divisi Siliwangi jarang sekali disebut atas perannya dalam menumpas pemberontakan PKI. Terutama mereka yang berjasa dalam melakukan penumpasan pemberontak. Siliwangi lebih terkenal dengan aksi *long march*-nya. Padahal

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ancaman yang berasal dari dalam negeri itu tidak kalah berbahayanya bagi kedaulatan negara.

Markas Besar Angkatan Perang segera mengadakan rapat untuk menyusun operasi penumpasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ratmanto (2012, hlm. 116) “Panglima Besar Jenderal Soedirman lewat Perintah Harian kemudian melakukan konsolidasi militer dengan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer daerah Surakarta-Madiun-Pati-Semarang dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur”. Panglima Besar Jenderal Soedirman menunjuk Kolonel Kolonel Gatot Subroto untuk segera mengembalikan keamanan seperti semula. Adapun pasukan yang bisa dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun adalah Pasukan Siliwangi dan satu Brigade Tentara dari Jawa Timur serta Tentara Pelajar dan Laskar-Laskar. Sangat menarik apabila melihat latar belakang Siliwangi yang semula memiliki daerah tanggung Jawab di Jawa Barat, namun harus ikut mengamankan Madiun yang secara teritorial bukan merupakan wilayah tugasnya. Divisi Siliwangi sebagai bagian dari TNI tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kedaulatan negaranya.

Dalam penulisan sejarah nasional terkadang peran dari kalangan yang dianggap kecil jasanya seperti kurang diperhatikan. Misalnya penumpasan pemberontakan PKI Madiun seringkali banyak menyebut tokoh-tokoh pemimpin yang dianggap lebih besar jasanya dalam memperjuangkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Sementara peran dari pasukan-pasukan yang berjuang di belakangnya tidak banyak diperbincangkan dalam penulisan sejarah nasional. Siliwangi merupakan nama legendaris yang pada masa perang kemerdekaan Republik Indonesia dijadikan tanda pengenal suatu Divisi Militer di Jawa Barat. Akan tetapi, orang-orang yang berada di balik kesuksesan nama besar Siliwangi tidak memiliki banyak tempat dalam penulisan sejarah nasional. Tanpa ada mereka, khususnya dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun secara praktik barangkali menemui kegagalan. Padahal situasi ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia dapat menyelesaikan konflik dalam negeri sendiri, dengan menumpas habis gerakan dan menangkap tokoh di balik pemberontakan tersebut. Dalam penelitian yang akan disajikan, peneliti hanya akan banyak menjelaskan beberapa batalyon dari Divisi Siliwangi yang cukup memiliki

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peran penting saat menumpas pemberontakan. Diantaranya yakni Batalyon Kian Santang pimpinan Sambas Atmadinata, atas dasar bahwa Batalyon ini menjadi pelopor saat merebut kembali Madiun. Selain itu, Batalyon Kemal Idris dan Batalyon R.A. Kosasih sebagai Batalyon terakhir yang masih menumpas pemberontak di utara Surakarta. Peneliti tidak akan menjelaskan secara rinci, semua Batalyon yang dikerahkan dalam penumpasan karena keterbatasan sumber dan waktu untuk penelitian.

Sementara itu tidak lama setelah penumpasan pemberontakan dilakukan, Belanda kembali melancarkan Agresi Militer keduanya, dengan menyerang wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Praktis kesatuan-kesatuan militer terutama Divisi Siliwangi yang ketika itu berada di Jawa Tengah harus kembali ke Jawa Barat untuk membentuk daerah pertahanan. Belanda melancarkan serangannya terhadap ibu kota RI di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Dugaan serangan tersebut sudah diperkirakan sebelumnya oleh para pemimpin militer Indonesia. Maka dari itu, ketika serangan terjadi kesatuan-kesatuan militer Indonesia diperintahkan untuk melakukan perang gerilya. Kesatuan-kesatuan dari masing-masing Divisi diperintahkan untuk kembali menguasai daerah kantong yang pernah mereka tinggalkan. Divisi Siliwangi dengan tegar kembali ke wilayahnya di Jawa Barat.

Divisi Siliwangi kemudian melakukan *long march* yang dipimpin oleh Panglima Divisi sementara, Letnan Kolonel Daan Yahya. Peristiwa *long march* lebih berat daripada *hijrah*, sebab yang melakukan *long march* ini bukan hanya Pasukan Siliwangi saja, melainkan keluarga mereka juga ikut serta. Resiko yang dihadapi melibatkan jiwa daripada keluarga prajurit Siliwangi. Bahkan Panglima Divisi sementara, harus tertangkap oleh Belanda. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan *long march* tidak mudah dilaksanakan oleh pasukan Siliwangi dengan berjalan kaki ke wilayah Jawa Barat.

Dari beberapa pernyataan di atas timbul pertanyaan yang harus peneliti jawab dalam kajian penelitian ini tentang **“Kiprah Divisi Siliwangi dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1948-1949”**. Adapun peneliti memilih periode 1948 sebagai awal kajian, dengan alasan bahwa pada awal tahun tersebut Divisi Siliwangi mendapatkan tugas yang sangat berat

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yakni meninggalkan kampung halamannya di Jawa Barat. Hampir seluruh unsur kesatuan tempur Siliwangi diperintahkan untuk memindahkan kekuatannya ke Jawa Tengah. Sedangkan tahun 1949 menjadi akhir kajian karena awal tahun itu pula Divisi Siliwangi kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan perjuangannya membangun kantong-kantong pertahanan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti melihat masih sedikit tulisan sejarah yang menampilkan kiprah pasukan Siliwangi terutama kaitannya tentang *Kiprah Divisi Siliwangi dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1948-1949*. Penyusunan rumusan masalah penelitian dimaksudkan untuk mengarahkan pembahasan dalam proses penelitian yang dilakukan, sehingga fokus kajian lebih terarah. Adapun rumusan masalah ini disajikan dalam bentuk pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa Divisi Siliwangi melakukan *hijrah* dari Jawa Barat ke Jawa Tengah pada tahun 1948?
2. Bagaimana peranan Divisi Siliwangi dalam menumpas Pemberontakan PKI Madiun 1948?
3. Bagaimana tindakan Divisi Siliwangi dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran hasil yang hendak dicapai oleh peneliti setelah melakukan proses penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan atas dasar rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan penyebab *hijrahnya* Divisi Siliwangi, dimulai adanya perintah *hijrah* kemudian pada proses pelaksanaannya.
2. Menganalisis peranan Divisi Siliwangi dalam penumpasan Pemberontakan PKI Madiun 1948, yang terbagi menjadi dua tugas operasi yakni merebut kembali Madiun dan melakukan penumpasan di bagian Utara Surakarta.

3. Menganalisis tindakan yang diambil Divisi Siliwangi dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II, saat dikeluarkannya perintah Panglima Besar dan kembali ke Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul *Kiprah Divisi Siliwangi dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1948-1949*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti maupun khalayak banyak, antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penerapan pengalaman dan teori selama mengikuti perkuliahan di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Selain itu, penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang “Kiprah Divisi Siliwangi dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1948-1949”.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peranan Kesatuan TNI kebanggaan Jawa Barat yakni Divisi Siliwangi khususnya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama unsur kesatuan Divisi Siliwangi yang masih perlu digali dan dikembangkan kembali sehingga memiliki posisi yang sama dalam penulisan sejarah Indonesia.
3. Menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia kepada peserta didik dalam konteks membangun kesadaran nasional, bahwa kemerdekaan Indonesia memerlukan proses yang begitu panjang dengan mengorbankan jiwa dan raga para pejuang. Hal ini dapat dikembangkan pada jenjang SMA kelas XI berdasarkan Kompetensi Dasar 3.10. Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Bagi SMA kelas XII berdasarkan Kompetensi Dasar 3.1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang berisi gambaran umum mengenai kajian yang akan dikaji. Selain itu juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan. Kemudian mengenai tujuan dan mafaat penelitian serta terakhir struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini diuraikan dan dikaji mengenai beberapa konsep dan teori yang relevan dengan tema penelitian, kajian pustaka ini digunakan peneliti sebagai landasan berfikir dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Kemudian peneliti mengemukakan penjelasan mengenai konsep-konsep yang relevan dengan tema yang akan diangkat, serta menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup beberapa teori yang akan dipakai dalam membuat analisis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu pencarian sumber, pengolahan sumber dengan menggunakan kritik sumber, serta interpretasi berupa analisis fakta-fakta yang sudah didapat dan terakhir historiografi yaitu penulisan penelitian.

BAB IV Pembahasan, bab ini memuat uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa analisis sekaligus menjawab beberapa rumusan masalah penelitian.

Bab V Kesimpulan, bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana peneliti memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap jumlah masalah dalam penelitian. Interpretasi peneliti ini disertai dengan analisis peneliti dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan saran dari peneliti yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

Resta Cahya Nugraha, 2018

KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1948-1949

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Resta Cahya Nugraha, 2018

*KIPRAH DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 1948-1949*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu